



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KHOIRUL HADZIQ
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
3. NHK : 139560

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.870.871.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 671.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 372.400.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , Rp. 1.159.160.000
4. Tanah Seluas 337 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.295.091.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 1.319.820.000
6. Tanah Seluas 258 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, Rp. 53.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **535.000.000**

1. MOBIL, FORD EVEREST Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XSR155 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
4. MOBIL, JIP YJ Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	165.000.002
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.169.342.257
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.740.213.259
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.740.213.259

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.